



KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SULAWESI TENGAH

Dengan

YAYASAN PENDIDIKAN AL-AZHAR PALU  
TENTANG

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

**NOMOR : W24.HN.04.05- 3543**

**NOMOR : 0127/SMA-AM/IX/2021**



Pada hari ini **Selasa** tanggal **Duapuluhan Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu dua puluh Satu** bertempat di Kota Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Lilik Sujandi, Bc.IP., S.I.P., M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No.23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Drs. Abdul Basit Arsyad, M.Pd** : Ketua Yayasan Pendidikan Al-Azhar Palu, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Tanjung Malakosa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Al-Azhar yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama ini dan melakukan kerjasama dalam pembangunan nasional.

Pasal 1

**DASAR KESEPAHAMAN BERSAMA**

Yang menjadi dasar KESEPAHAMAN BERSAMA ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

14. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud KESEPAHAMAN BERSAMA ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien dalam pembangunan di bidang hukum baik normatif maupun materil berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan KESEPAHAMAN BERSAMA ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan Kesadaran hukum, Administrasi Hukum Umum, Sistem Pemasyarakatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual, serta Penyelenggaraan sosialisasi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dikalangan Guru dan Siswa melalui peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia melalui:
  - a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat;
  - a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat;
  - b. Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - c. Pengembangan Pendidikan umum Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
  - d. Penyelenggaraan Latihan Kerja Produksi Warga Binaan Pemasyarakatan

2. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual;
  - a. Penyelenggaraan Sosialisasi Kekayaan Intelektual;
  - b. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
  - c. Penerbitan Sertifikat dan surat pencatatan Kekayaan Intelektual (KI)
3. Pelaksanaan Kerja Sama di bidang Imigrasi melalui:
  - a. Penerbitan izin Keimigrasian bagi mahasiswa asing yang belajar di Kepala Sekolah Menengah Atas Al-Azhar Palu;
  - b. Pengawasan orang asing bagi mahasiswa asing dan tenaga pengajar asing yang belajar dan mengajar di Kepala Sekolah Menengah Atas Al-Azhar Palu; dan
  - c. Pelayanan izin Keimigrasian berupa penerbitan Paspor R.I.
4. Pelaksanaan advokasi Hak Asasi Manusia;
5. Pengkajian dan penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia,
6. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan **PARA PIHAK** melalui:
  - a. Pertukaran data dan informasi; dan
  - b. Pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

#### Pasal 4

##### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan KESEPAHAMAN BERSAMA ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Sekolah Pertama/Menengah Atas Al-Azhar Mandiri tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan KESEPAHAMAN BERSAMA akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

- (1) KESEPAHAMAN BERSAMA ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani KESEPAHAMAN BERSAMA ini.
- (2) KESEPAHAMAN BERSAMA ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap KESEPAHAMAN BERSAMA ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri KESEPAHAMAN BERSAMA ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum KESEPAHAMAN BERSAMA ini berakhir atau diakhiri.

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan KESEPAHAMAN BERSAMA ini ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya secara proporsional dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 7

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi KESEPAHAMAN BERSAMA ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pembrotakan, revolusi, makar. Huru-hara, teorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan KESEPAHAMAN BERSAMA karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan KESEPAHAMAN BERSAMA ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 9

### PERUBAHAN/PENAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam KESEPAHAMAN BERSAMA ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) KESEPAHAMAN BERSAMA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KESEPAHAMAN BERSAMA ini.

- (2) Perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) KESEPAHAMAN BERSAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dari KESEPAHAMAN BERSAMA ini dibentuk paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak KESEPAHAMAN BERSAMA ini ditandatangani.

Demikian KESEPAHAMAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

Ketua Yayasan Al-Azhar *Mandiri*



Drs. Abdul Basit Arsyad, M.Pd

**PIHAK KESATU,**

Kepala Kantor Wilayah

Lilik Sujandi, Bc.IP., S.I.P.,M.Si.